

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dana tersebut pada masyarakat pula. Beberapa tahun terakhir industri perbankan telah mengalami perkembangan cukup pesat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya persentase nasabah dalam memanfaatkan produk dan jasa bank. Dengan berkembangnya industri perbankan ini juga perlu diperhatikan bagaimana perusahaan dapat menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk memberikan kemajuan pada bank itu sendiri.

Penerapan prinsip *good corporate governance* dapat ditempuh dengan beberapa cara. Diantaranya dengan mempertimbangkan tolak ukur pencapaian tujuan bank yaitu melalui kinerjanya. Kinerja merupakan hasil dari rangkaian proses manajemen perusahaan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan (Moerdiyanto, 2011). Keuntungan tersebut diperoleh dari hasil kegiatan operasional bank, yang dapat berupa aset suatu bank. Aset tersebut kemudian dikelola dengan memperhatikan efisiensi sehingga bank dapat terus berkembang di pasaran. Pengukuran kinerja ini dapat diukur dengan kinerja bank melalui perhitungan rasio *Return on Asset (ROA)*. Rasio ini memanfaatkan informasi laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan terhadap total aset yang dimiliki oleh bank.

Selain itu, terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja bank. Salah satunya dengan mempertimbangkan struktur organisasi suatu bank. Apabila suatu bank memiliki struktur organisasi yang baik, maka dapat membantu tercapainya keberhasilan suatu bank tersebut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan bank berada, yaitu lingkungan politik. Bank yang marak diperbincangkan belakangan ini, ialah bank yang memiliki sumber pendanaan dengan akses mudah akibat adanya koneksi politik.

Bank yang memiliki koneksi politik adalah bank dimana terdapat individu atau kelompok dari direksi, anggota dewan komisaris, komisaris independen, para pemegang saham, maupun kerabat adalah pemegang jabatan politik atau dapat dikatakan sebagai politikus (Faccio *et. Al.*, 2006). Pada industri perbankan yang terkoneksi politik salah satunya merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah, diantaranya Bank Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Hal tersebut memberikan dampak tersendiri bagi bank yang terkoneksi politik. Salah satu dampak yang diperoleh berkaitan dengan pengadaan sumber daya bank. Apabila bank terkoneksi politik maka akan dengan mudah memperoleh fasilitas sumber daya melalui pinjaman, kontrak, maupun hibah dari pemerintah. Diantaranya dengan adanya kebijakan, pengalokasian sumber daya, hingga persetujuan dalam pembangunan suatu proyek (Maaloul, *et. Al.*, 2016). Tak terkecuali, hal ini juga dapat dimanfaatkan perusahaan yang berkembang di industri perbankan untuk memperluas aset yang dimiliki. Sehingga berpotensi untuk

meningkatkan kinerja bank karena adanya keunggulan dari perusahaan terkoneksi politik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Disamping itu, dampak negatif yang dihasilkan dari perusahaan di industri perbankan apabila terkoneksi politik ialah memburuknya kinerja bank itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan mudahnya sumber daya yang diperoleh bank, dimana pengembalian sumber daya tersebut memiliki risiko yang tinggi. Diantaranya biaya untuk pengembalian sumber daya yang tidak terjangkau, sehingga dapat mengurangi hasil akhir dari keuntungan bank.

Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bank yang terkoneksi politik terhadap kinerjanya, bank memerlukan seseorang yang dapat bertindak secara adil. Dimana hal yang dilakukan semata-mata demi kepentingan bank. Peran seseorang tersebut akan menduduki jabatan yang berpengaruh pada suatu pengambilan keputusan bank. Antara lain, jabatan sebagai dewan komisaris.

Fungsi dewan komisaris sebagai pengendali serta pengawas mekanisme bank untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan tercapainya tujuan perusahaan (Darwis, 2009). Dengan demikian, peranan dewan komisaris pada suatu bank amatlah penting. Selain itu, banyaknya anggota dewan komisaris dalam suatu bank juga dapat mempengaruhi efektifitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan bank. Agar tercapainya tujuan bank yang tepat sesuai dengan praktik *corporate governance*, maka komposisi keanggotaan dewan tersebut dicapai dengan pengangkatan anggota dewan dari luar bank. Apabila komposisi keanggotaan dewan dari luar bank semakin besar, maka

dapat dianggap semakin independen. Keanggotaan dewan ini disebut dengan komisaris independen.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, anggota dewan komisaris lain, maupun para pemegang saham. Sehingga peran komisaris independen pada bank yaitu dapat mengontrol setiap keputusan yang akan diambil oleh bank untuk mencapai tujuan bank dan dapat memastikan bahwa bank telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Selain itu, adanya komisaris independen juga diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang baik, serta dapat menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan para direksi bank termasuk pada pengawasan kinerja bank tersebut.

Dengan demikian, adanya peran komisaris independen pada perusahaan khususnya di industri perbankan yang memiliki koneksi politik diharapkan dapat menekan adanya dampak negatif yang ditimbulkan. Dimana dampak negatif tersebut akan mempengaruhi kinerja bank itu sendiri. Apabila komisaris independen dapat menggunakan independensinya dengan baik serta dapat bekerja secara efektif dalam pemantauan kinerja, maka bank yang terkoneksi politik tidak dapat semena-mena menggunakan haknya untuk mendapatkan kemudahan akses sumberdaya. Sehingga hal tersebut tidak akan memberikan dampak memburuknya kinerja bank karena pengurangan keuntungan yang diperoleh. Dengan hal ini, peran komisaris independen dapat dijadikan sebagai pemoderasi dalam keterkaitan antara bank yang memiliki koneksi politik terhadap kinerja banknya.

Untuk mendukung latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis juga mempertimbangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2009) menunjukkan hasil jika kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Tri Wulandari (2013) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maaloul, *et. Al.*, (2016) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara koneksi politik dengan kinerja dan nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan beserta adanya perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai “Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Bank dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan di Indonesia”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di sub bab atas, masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bank pada Perbankan di Indonesia?

2. Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank pada Perbankan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah diketahui rumusan masalah yang ada dalam penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menguji adanya pengaruh secara signifikan dari koneksi politik terhadap kinerja bank pada Perbankan di Indonesia.
2. Untuk menguji komisaris independen dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank pada Perbankan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai keterkaitan antara koneksi politik dengan kinerja bank pada Perbankan di Indonesia.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai perbendaharaan pustaka untuk menambah ilmu dan wawasan bagi masyarakat disekitar lingkungan STIE Perbanas Surabaya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang berkaitan dengan pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada Perbankan di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi menjadi beberapa bab yang menjelaskan bagian-bagian penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang masalah yang dapat memunculkan rumusan masalah yang akan dihadapi, tujuan penelitian ingin dicapai, manfaat penelitian yang diterima, hingga bagaimana sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu, landasan teori penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan

pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian.

